



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111  
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: [helpdesk.lib@unsyiah.ac.id](mailto:helpdesk.lib@unsyiah.ac.id)

---

## **ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH**

### **TITLE**

**KOMUNIKASI POLITIK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI KABUPATEN NAGAN RAYA (STUDI PADA PERSETUJUAN DAN PENETAPAN QANUN)**

### **ABSTRACT**

#### **ABSTRAK**

**LIAN KURNIA WAN KOMUNIKASI POLITIK EKSEKUTIF DAN  
LEGISLATIF DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

2016 Studi Pada Persetujuan dan Penetapan Qanun)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Syiah Kuala (vi, 65), pp, tabel, bibli.

(Dm. Zainal Abidin, M.Si)

Komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif dalam persetujuan dan penetapan Qanun menentukan keberhasilan pembentukan sebuah Qanun Di Kabupaten Nagan Raya, diperoleh fakta bahwa sering terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif, sehingga menyebabkan lambatnya persetujuan terhadap rancangan Qanun, dan sebagainya. Dalam keadaan tertentu komunikasi politik eksekutif dan legislatif bukan lagi sebagai mitra, tetapi sebagai institusi yang saling berkonfrontasi.

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang komunikasi politik eksekutif dan legislatif dalam persetujuan dan penetapan Qanun di Kabupaten Nagan Raya, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi politik tersebut, dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan dokumen serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai secara mendalam para informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa persetujuan legislatif, tidak mungkin sebuah rancangan Qanun dapat ditetapkan menjadi Qanun. Untuk melahirkan persetujuan itu, segala bentuk komunikasi politik dilakukan oleh eksekutif, termasuk memberikan imbalan material kepada legislatif. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan komunikasi tersebut yaitu adanya perbedaan cara pandang dalam melihat dan menilai suatu permasalahan yang terjadi, adanya kepentingan politik yang berbeda antara pimpinan eksekutif dengan pimpinan dan anggota legislatif karena beda basis politik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah mengirim para pejabat eksekutif dan legislatif yang potensial secara bersama-sama untuk mengikuti berbagai pelatihan legal drafting, mengoptimalkan peran Sekretaris DPRK sebagai mediator eksekutif dan legislatif, dan meningkatkan hubungan personal antara eksekutif dan legislatif.

Komunikasi politik yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif dapat terus dipertahankan walaupun eksekutif mendominasi politik lokal di Nagan Raya, eksekutif dan legislatif dapat selalu bersama-sama dalam mengikuti berbagai kegiatan pembekalan yang berkenaan dengan legal drafting dan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan lainnya. Perlu ditingkatkan hubungan personal antara eksekutif dan legislatif.

Kata Kunci : eksekutif, legislatif, komunikasi politik

via e-mail